



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pengampu hibah dan bantuan sosial, sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);



19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKAPPKD adalah rencana kerja dan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.



14. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran PD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
21. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



22. Badan dan lembaga yang berhak menerima hibah adalah badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota, dan atau kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah;
- c. memiliki sekretariat tetap.

(3) Kekurangan persyaratan surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini wajib dilengkapi pada saat penandatanganan NPHD.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah atau Kepala PD yang membidangi.



- (2) Batas penyampaian usulan tertulis disampaikan kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah dan/atau Kepala PD selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penetapan Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PD dimasukkan ke dalam system informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi untuk memasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PD yang membidangi melakukan evaluasi.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi melakukan evaluasi.
- (7) Evaluasi oleh Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif.
- (8) Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melakukan evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk uang dengan ketentuan:
  - a. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Kesehatan, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) sesuai bidang tugasnya;
  - b. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. Dinas Pertanian Dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, serta Dinas Ketahanan Pangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian dan kelautan perikanan sesuai bidang tugasnya;
  - d. Dinas Ketahanan Pangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan sesuai bidang tugasnya;



- e. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan umum sesuai bidang tugasnya;
  - f. Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan sesuai bidang tugasnya;
  - g. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kebudayaan sesuai bidang tugasnya;
  - h. Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata, dan Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kepemudaan dan keolahragaan non profesional sesuai bidang tugasnya;
  - i. Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi Dan Informatika melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang sosial kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
  - j. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesehatan sesuai bidang tugasnya;
  - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai bidang tugasnya.
- (9) Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang, belum terakomodir oleh PD atau Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Daerah menunjuk Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi untuk melakukan evaluasi.
- (10) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian dalam arti luas termasuk tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, koperasi dan usaha kecil, perdagangan dan perindustrian sesuai bidang tugasnya;



- b. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, dan Dinas Komunikasi Dan Informatika, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, infrastruktur, pekerjaan umum, perumahan rakyat, energi, sumberdaya alam, sumberdaya mineral, perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai bidang tugasnya;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Arsip Dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan masyarakat, teknologi tepat guna, kearsipan dan keperpustakaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kepariwisataan, kesejahteraan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kepemudaan dan keolahragaan sesuai bidang tugasnya.
- (11) Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa, belum terakomodir oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Sekretaris Daerah menunjuk Kepala PD yang membidangi untuk melakukan evaluasi.
  - (12) Pedoman teknis tentang mekanisme dan tata cara evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk barang/jasa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang membidangi.
  - (13) Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
  - (14) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (14) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
  - (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
  - (2) Objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Pemerintah;
    - b. Pemerintah Daerah lain;
    - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
    - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
  - (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga pada Kepala PD.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- 

- (2) Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang daftar penerima hibah sesuai bidang tugasnya.
  - (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
  - (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
  - (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
  - (6) Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dicairkan sekaligus dan/atau bertahap.
  - (7) Penyerahan hibah dalam bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Penyerahan hibah dalam bentuk jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) wajib menyiapkan konsep NPHD sesuai bidang tugasnya.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Pemberian Hibah dalam bentuk uang, NPHD ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah uang, dengan:



- a. penyaluran hibah di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Gubernur;
  - b. penyaluran hibah di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - c. penyaluran hibah sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi.
- (5) Pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa, NPHD ditandatangani oleh Kepala PD selaku Pengguna Anggaran/Barang dan Penerima Hibah Barang/Jasa.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penyerahan Hibah dalam bentuk barang/jasa disertai dengan berita acara serah terima.
  - (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala PD selaku Pengguna Anggaran/Barang dan Penerima Hibah Barang/Jasa.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi.
  - (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi.
10. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :



- a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
- a. memiliki identitas yang jelas;
  - b. berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.
10. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggota/keompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah atau Kepala PD yang membidangi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PD dimasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.



- (3) Kepala PD yang membidangi melakukan evaluasi usulan yang sudah masuk dalam sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Evaluasi oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif.
  - (5) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan uraian tugas dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial adalah sebagai berikut:
    - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang pendidikan;
    - b. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang kesehatan;
    - c. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang pemugaran rumah tidak layak huni;
    - d. Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
  - (6) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat menunjuk Kepala PD atau Kepala Biro untuk melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - (7) Bantuan sosial dalam bentuk barang dievaluasi oleh Kepala PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - (8) Kepala PD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
  - (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
11. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 36

Rekomendasi Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam Rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS APBD.

12. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 42

Bantuan sosial dalam bentuk barang proses pengadaannya dilakukan oleh Kepala PD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diserahkan kepada penerima bantuan sosial.

13. Ketentuan Pasal 43 ayat (2), ayat (4), dan ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 43

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial sesuai bidang tugasnya.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya/bencana.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi.

- (5) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), apabila dalam kondisi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dapat dilaksanakan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang.
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (7) Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang dituangkan dalam berita acara serah terima yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
  - a. identitas penerima bantuan sosial;
  - b. tujuan pemberian bantuan sosial; dan
  - c. kewajiban penerima bantuan sosial.
- (8) Berita acara serah terima ditandatangani oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah atau Kepala PD atau Kepala Biro dan penerima bantuan sosial, dengan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang sebagai berikut :
  - a. penyerahan barang dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Gubernur;
  - b. penyerahan barang dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - c. penyerahan barang dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi.

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi.



15. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut penggunaan:

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada PD yang membidangi.

16. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

17. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan, saran atau laporan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Masukan, saran atau laporan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi dengan tembusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

18. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 56

- (1) Penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 23, Pasal 45 dan Pasal 49 dikenakan sanksi.
  - (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis dari Kepala PD atau Kepala Biro sampai dengan tidak diberikan hibah dan/atau bantuan sosial dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah dan/atau bantuan sosial.
19. Ketentuan Pasal 57 huruf b diubah sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku :

- a. Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap :
  1. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  2. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  3. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  4. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing bersama warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- b. Bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikecualikan bagi penerima Kartu Jateng Sejahtera (KJS).



- c. Pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai akibat pengalihan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2017 atau setelah proses peralihan kewenangan selesai.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **5 Juli 2017**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal **5 Juli 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH

TATA CARA PENGANGGARAN HIBAH

**A. HIBAH DALAM BENTUK UANG.**

**1. Hibah Kepada Pemerintah (Instansi Vertikal).**

a. Sasaran

Hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) dapat diberikan kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

b. Persyaratan dan mekanisme

Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.**

a. Sasaran

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapat diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

b. Persyaratan dan mekanisme

Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.**

a. Sasaran

Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah.

b. Persyaratan dan mekanisme

Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan**

**a. Hibah bidang perekonomian meliputi:**

- 1) Hibah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan dan perikanan.

a) Sasaran

Hibah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan dan perikanan dapat diberikan kepada badan atau lembaga yaitu kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan atau pemasar ikan, kelompok petani garam, kelompok wanita dan taruna pesisir, kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan, kelompok tani, kelompok tani ternak, kelompok tani perkebunan, kelompok wanita tani, kelompok taruna tani, gabungan kelompok tani, kelompok/unit pengolahan hasil pertanian, kelompok usaha bersama, lembaga masyarakat desa hutan, kelompok pemilik/pengelola hutan rakyat/hak, koperasi, asosiasi, dan atau kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan dan perikanan.

b) Persyaratan:

- (1) surat pengesahan/penetapan dari PD yang membidangi di Kabupaten/Kota
- (2) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (3) memiliki susunan kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
- (4) proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor kontak person.



c) Mekanisme:

- (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat, Camat dan PD yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- (3) Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (4) Hasil evaluasi administrasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2) Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan.

a) Sasaran

Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan dapat diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu di bidang pertanian dalam menciptakan kemandirian pangan di tingkat kelompok.

b) Persyaratan:

- (1) Memiliki surat pengesahan/penetapan dari PD yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- (2) Memiliki surat rekomendasi dari PD yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- (3) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (4) memiliki susunan kepengurusan lembaga;

- (5) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, fotocopy KTP Ketua dan Bendahara serta rencana anggaran biaya (RAB).

c) Mekanisme:

- (1) Kelompok masyarakat mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah up. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya serta dilegalisasi oleh Camat;
- (3) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

**b. Hibah bidang pendidikan meliputi:**

1) Bidang pendidikan umum:

a. Sasaran

Hibah bidang pendidikan umum dapat diberikan kepada satuan pendidikan:

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- (2) Tempat Penitipan Anak (TPA);
- (3) Kelompok Bermain (KB);
- (4) Taman Kanak-Kanak (TK);
- (5) Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- (6) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) Swasta;
- (7) Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Swasta;
- (8) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB) Swasta;
- (9) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta;



(10) Perguruan Tinggi, yang terdiri dari :

- (a) Akademi;
- (b) Politeknik;
- (c) Sekolah Tinggi;
- (d) Institut;
- (e) Universitas.

(11) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

(12) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

(13) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);

(14) Kelompok Belajar Usaha (KBU);

b. Persyaratan

- (1) memiliki ijin pendirian dan ijin operasional yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) direkomendasi oleh PD Kabupaten/Kota atau Provinsi yang menangani bidang pendidikan sesuai kewenangan atau Lembaga/Instansi berwenang bagi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- (3) memiliki Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (4) memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (5) berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- (6) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga.

c. Mekanisme

- (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua/Kepala lembaga dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya), Camat setempat;
- (3) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;

- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2) **Hibah pendidikan keagamaan.**

a) Sasaran

Hibah bidang pendidikan keagamaan dapat diberikan kepada satuan pendidikan meliputi :

- (1) Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Darul Athfal (DA) Swasta;
- (2) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MI/MILB) Swasta;
- (3) Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTs/MTsLB) Swasta;
- (4) Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Luar Biasa (MA/MALB) Swasta;
- (5) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)/pendidikan sejenis yang sederajat;
- (6) Madrasah Diniyyah;
- (7) Pondok Pesantren.

b) Persyaratan

- (1) memiliki Ijin Operasional/Piagam Madrasah/Nomor Statistik/dokumen sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
- (2) memiliki surat rekomendasi dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
- (3) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (4) memiliki susunan kepengurusan lembaga;
- (5) berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- (6) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor kontak *person*.

c) Mekanisme

- (1) Pimpinan/Kepala satuan pendidikan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan dilampiri proposal;



- (2) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (3) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (4) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

**c. Hibah bidang keagamaan**

1) Sasaran

Hibah bidang keagamaan dapat diberikan kepada lembaga:

- a) Tempat ibadah meliputi : Masjid/Musholla/Langgar, Gereja/Kapel, Pura, Vihara/klenteng dan sejenisnya.
- b) Lembaga keagamaan.

Hibah bidang keagamaan dapat digunakan untuk :

- a) Pembangunan dan/atau rehabilitasi tempat ibadah dan gedung majelis taklim dan sejenisnya;
- b) Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah dan gedung majelis taklim dan sejenisnya;
- c) Mendukung kegiatan pada lembaga keagamaan dan sejenisnya.

2) Persyaratan

- a) Memiliki Surat Pengesahan/Penetapan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berupa rekomendasi legalitas.
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua Lembaga/Pengurus/Takmir.;
- c) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- d) Memiliki susunan kepengurusan yang jelas;
- e) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan nomor kontak person.

3) Mekanisme

- a) Pemohon mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;

- c) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- d) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

**d. Hibah bidang kesehatan.**

1) Sasaran

Hibah bidang kesehatan dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (yayasan) yang mempunyai dan/atau mengelola pelayanan kesehatan dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan yang meliputi upaya kesehatan masyarakat dan/atau upaya kesehatan perorangan.

2) Persyaratan

- (1) Berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (2) Memiliki ijin operasional yang masih berlaku sesuai ketentuan;
- (3) Memperoleh rekomendasi dari PD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- (4) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (5) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (6) Memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (7) Memiliki susunan kepengurusan lembaga;
- (8) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga serta nomor kontak person.

3) Mekanisme

- (1) Pemohon penyelenggara pelayanan kesehatan dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan diberi rekomendasi oleh Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- (3) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan kajian dan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (4) Hasil kajian dan evaluasi administrasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;



- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

**e. Hibah bidang kebudayaan**

1) Sasaran

Organisasi Kemasyarakatan yang mengelola cagar budaya (candi, bangunan bersejarah, struktur, situs dan kawasan), museum, organisasi kesenian/sanggar seni, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat Sejarah Indonesia.

2) Persyaratan

Persyaratan proposal hibah bidang Kebudayaan dari organisasi kemasyarakatan yang mengelola cagar budaya (candi, bangunan bersejarah, struktur, situs dan kawasan), museum, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat Sejarah Indonesia, Persatuan Lembaga Adat yang berskala besar dengan cakupan nasional dan internasional adalah :

- a) memiliki status sebagai badan hukum Indonesia paling sedikit 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;
- b) memiliki rekomendasi dari PD Kabupaten/Kota;
- c) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- d) memiliki kepengurusan yang jelas;
- e) memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- f) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, latar belakang, maksud dan tujuan, susunan pengurus dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- g) tidak terjadi konflik internal dinyatakan dengan Surat Pernyataan.

Persyaratan proposal hibah bidang Kebudayaan dari organisasi kesenian/kebudayaan, sanggar seni budaya, lembaga seni dan budaya lembaga adat yang bersifat lokal kedaerahan dengan cakupan tingkat kabupaten ke bawah, adalah:

- a) Berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- b) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- c) memiliki kepengurusan yang jelas;
- d) memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, latar belakang, maksud dan tujuan, susunan pengurus dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- f) tidak terjadi konflik internal dinyatakan dengan Surat Pernyataan.

3) Mekanisme

- a) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan proposal;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua Lembaga pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/kota;
- c) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

**f. Hibah bidang Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan Non Profesional.**

1) Sasaran

Hibah bidang Kepemudaan, kepramukaan, dan Keolahragaan Non Profesional dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (perkumpulan) yang bergerak di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan non profesional.

2) Persyaratan:

- a) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat; dan
- b) proposal sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, susunan pengurus, dan dilengkapi fotocopy KTP Ketua dan bendahara serta rencana anggaran biaya (RAB);

- c) memiliki kepengurusan yang jelas;
- d) Memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e) Berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- f) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, latar belakang, maksud dan tujuan, susunan pengurus dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

### 3) Mekanisme

- a) Pemohon tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi di tingkat Kabupaten/Kota;
- c) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

### **g. Hibah bidang sosial kemasyarakatan.**

#### 1) Sasaran :

Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan dapat diberikan kepada :

- 1. Organisasi Kemasyarakatan yang mengelola kegiatan kemasyarakatan sesuai fungsinya.
- 2. Badan dan lembaga yang mengelola kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai fungsinya yang dibentuk oleh Gubernur.

#### 2) Persyaratan

Proposal permohonan hibah bidang sosial kemasyarakatan harus dilengkapi persyaratan pada :

##### (1) Organisasi Kemasyarakatan :

- a) memiliki kepengurusan yang jelas;

- b) berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- d) proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat kegiatan, lokasi kegiatan, susunan pengurus dilengkapi fotocopy KTP Ketua, Bendahara, rencana anggaran biaya (RAB) serta surat rekomendasi dari PD Kabupaten/Kota;
- e) memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- f) berbadan Hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling sedikit 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan lembaga:

- a) memiliki Surat Pengesahan/Penetapan yang diterbitkan oleh PD yang berwenang;
- b) memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya dan diketahui oleh Camat;
- d) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- e) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga.

3) Mekanisme

- (1) Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah up. Sekretaris Daerah atau Kepala PD Pengampu;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi Dan Informatika, melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;

- (4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

**h. Hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.**

1) Sasaran

Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (yayasan/perkumpulan) yang bergerak dan/atau mengelola kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta lembaga penyedia layanan yang bergerak dan/atau mengelola kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan anak.

2) Persyaratan:

- 1) Berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Rekomendasi PD yang membidangi tingkat Kabupaten/kota atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bagi Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi.
- 3) Surat keterangan domisili Sekretariat tetap dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- 4) Surat keputusan tentang kepengurusan yang sah;
- 5) Berkedudukan dan memiliki Sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

- 6) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, nama kegiatan, output kegiatan, lokasi kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan nomor kontak person yang ditandatangani oleh Ketua yang sah;
  - 7) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara yang sah.
- 3) Mekanisme
- 1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan dilampiri proposal;
  - 2) Permohonan ditandatangani oleh pimpinan/ketua dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya dan Camat setempat sesuai domisili kantor sekretariat;
  - 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan pemohon;
  - 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
  - 5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## **B. HIBAH DALAM BENTUK BARANG /JASA**

Tata cara Pengusulan, Evaluasi, Pengajuan Rekomendasi Dan Pertimbangan Pemberian Hibah dalam bentuk barang/jasa diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi.



## KOP SURAT SETDA/PD

---

....., .....

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Gubernur Jawa Tengah  
Lampiran : Lewat  
Perihal : Rekomendasi Pemberian Hibah Yth. Sekretaris Daerah  
Dalam Bentuk Uang Selaku Ketua TAPD  
di  
SEMARANG

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama  
Pangkat  
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
  2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
  3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
  4. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
  5. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
  7. Arsip.
-



## KOP SURAT SETDA/PD

---

....., .....

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lampiran	:	Lewat
Perihal	:	Rekomendasi Pemberian Hibah <u>Dalam Bentuk Barang/Jasa</u>
		Yth. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD di <u>SEMARANG</u>

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama  
Pangkat  
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
  2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
  3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  5. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
  7. Arsip.
- 

1 A



LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH.

TATACARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERIAN HIBAH

**A. HIBAH DALAM BENTUK UANG.**

1. Pelaksanaan

- a. Biro/PD yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD serta mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum disertai kontak person penerima hibah.
- b. Biro/PD yang ditunjuk memberitahukan kepada calon penerima hibah tentang anggaran belanja hibah yang akan diberikan sesuai Peraturan Daerah tentang APBD.
- c. Biro/PD menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Pencairan

- a. Pencairan belanja hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
- b. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah setelah diverifikasi oleh Biro/PD yang membidangi;
- c. Surat permohonan pencairan dilampiri :
  - 1) Naskah Perjanjian Hibah bermaterai cukup;
  - 2) Rencana Penggunaan Dana;
  - 3) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif;
  - 4) Fotocopy indentitas diri pimpinan/ketua yang masih berlaku;
  - 5) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
  - 6) Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
- d. Untuk pencairan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan pencairan tahap berikutnya dilampiri dengan :
  - 1) Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

- 2) Fotocopy Rencana Penggunaan Dana;
  - 3) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif dan dilegalisir oleh bank;
  - 4) Fotocopy KTP pimpinan/ketua yang masih berlaku;
  - 5) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
  - 6) Fotocopy Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
  - 7) Laporan penggunaan dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.
- e. Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 4 (empat).
- f. Biro/PD yang membidangi membuat pengantar/rekomendasi kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai dasar pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penatausahaan
- Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **B. HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA.**

1. Pelaksanaan
  - a. PD yang membidangi menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
  - b. PD yang membidangi merencanakan penyerahan barang/ jasa yang akan dihibahkan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional PD yang membidangi.
  - c. Pengadaan Barang/Jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh PD yang membidangi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - d. PD yang membidangi menyiapkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Penatausahaan dan penyerahan hibah dalam bentuk barang/jasa.

Tatacara penatausahaan pelaksanaan dan penyerahan hibah dalam bentuk barang/jasa diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi.



C. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH  
DALAM BENTUK UANG.

GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR

TENTANG

PENERIMA HIBAH ..... TAHUN ..... ANGGARAN .....  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka .....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal ..... Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah .... Tahun Anggaran ....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .... Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .... Nomor ....);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .... Nomor ....);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor .....);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .. Nomor .....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah ....., yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Hibah ..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada .... (.....) lembaga pemerintah/masyarakat/organisasi kemasyarakatan sebesar ....., - (.....).
- KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pencairan belanja hibah ..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KEENAM : Penerima hibah ..... wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala ..... (PD/Unit Kerja yang membidangi) paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .....
- KEDELAPAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala ..... Provinsi Jawa Tengah\*);
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota pada daerah penerima hibah.



D. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH  
DALAM BENTUK BARANG/JASA

GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR

TENTANG

PENERIMA HIBAH ..... TAHUN ANGGARAN .....  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka .....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal ..... Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah .... Tahun Anggaran .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor ... Seri ... Nomor ...., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .....);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .... Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .... Nomor ....);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ....);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor .....);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .. Nomor .....);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah ....., yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Guberur ini.
- KEDUA : Hibah ..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada ....(.....) lembaga pemerintah/masyarakat/organisasi kemasyarakatan jenis barang.....dengan volume.....
- KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala .....\*) untuk melaksanakan penyaluran hibah ..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KEENAM : Penerima hibah ..... wajib melaporkan penggunaan hibah barang/jasa kepada Gubernur melalui Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Nilai hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada nilai kontrak pengadaan barang/jasa yang telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .....
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
  2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
  3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
  8. Kepala ..... Provinsi Jawa Tengah\*);
  9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
  11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
  12. Bupati/Walikota pada daerah penerima hibah.
- \*) Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi untuk Hibah dalam bentuk barang/jasa.



## KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/PD

---

### NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
..... NAMA PENERIMA HIBAH .....

NOMOR :

NOMOR :

#### TENTANG

HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu .....,  
bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama PIHAK PERTAMA : .....*Jabatan*..... berkedudukan di .....*Nama Kota*....., Jalan ....., berdasarkan Keputusan ....., bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama PIHAK KEDUA : Ketua .....*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., berkedudukan di .....*Nama Kota*....., Jalan ....., berdasarkan Keputusan ....., bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili .....*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ..... Tahun .....tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ..... (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .....Nomor.....);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ....);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ..... Tahun .....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ..... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun.....Nomor .....);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun.....tentang Penerima Hibah.....;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan pendanaan kegiatan .....Nama Lembaga..... Tahun Anggaran ....., dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan pada .....Nama Lembaga Penerima Hibah..... Tahun .....

#### Pasal 2

Penggunaan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk pembayaran Belanja Pegawai/Belanja Barang dan Jasa/Belanja Modal Tahun .....

### Pasal 3

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk Kegiatan :

- a. ....;
- b. ....; dst

### Pasal 4

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp.....(.....*terbilang*.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ....., dengan kode rekening.....yang diberikan pada .....

### Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA.

### Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- c. melaporkan realisasi penggunaan dana hibah pada akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada PD Pengampu dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

### Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

### Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan.

### Pasal 9

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- a. Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Hibah .....*Nama Lembaga Penerima Hibah*..... Tahun ..... masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja hibah .....*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah disertai proposal penggunaan sisa dana hibah.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Gubernur Jawa Tengah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

#### Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember .....

#### Pasal 12

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

#### Pasal 13

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dampak dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

#### Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

#### Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

## KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/PD

---

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN

..... NAMA PENERIMA HIBAH .....

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA KEPADA .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama PIHAK PERTAMA : .....*Jabatan*..... berkedudukan di .....*Nama Kota*....., Jalan ....., berdasarkan Keputusan ....., bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama PIHAK KEDUA : Ketua .....*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., berkedudukan di .....*Nama Kota*....., Jalan ....., berdasarkan Keputusan ....., bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili .....*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ..... Tahun .....tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ..... (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ..... Nomor .....);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ..... Nomor .....);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ..... Tahun .....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ..... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun.....Nomor .....);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun.....tentang Penerima Hibah .....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan barang/jasa kepada .....Nama Lembaga..... dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bertujuan untuk mendukung..... pada .....*Nama Lembaga Penerima Hibah*.....

#### Pasal 2

Barang/jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk .....

### Pasal 3

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa barang/jasa dalam bentuk.....(jumlah) ..... unit .....(nama barang) ..... senilai Rp. ....(.....*terbilang*.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ....., dengan kode rekening .....

### Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK PERTAMA.

### Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mengelola barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melaporkan penggunaan barang/jasa kepada PIHAK PERTAMA melalui PD/Unit Kerja pengampu dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan sebagian atau seluruhnya barang/jasa yang dihibahkan sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan barang/jasa yang telah diberikan.

### Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

### Pasal 8

- (1) Penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember .....

Pasal 10

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 11

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dampak dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

## KOP SURAT PENERIMA HIBAH

---

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Nama Lembaga :  
Alamat Lembaga :  
Nomor Telp/HP :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor ..... dan nomor ..... tanggal ..... menyatakan bahwa saya :

- a. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah;
- c. melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- d. tidak secara berturut-turut menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan  
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)



## KOP SURAT PENERIMA HIBAH

---

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Nama Lembaga :  
Alamat Lembaga :  
Nomor Telp/HP :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor ..... dan nomor ..... tanggal ..... menyatakan bahwa saya :

- a. akan menggunakan barang/jasa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang/jasa;
- c. melaporkan penggunaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- d. tidak secara berturut-turut menerima hibah barang/jasa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan  
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)



I. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/PD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ..... Tahun .....tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .....
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penerima Hibah .....
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor ..... dan Nomor ..... tanggal ..... tentang .....

KEDUA belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima hibah dalam bentuk barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap ..... untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima Barang

( ..... )

PIHAK PERTAMA  
Yang Menyerahkan Barang

( ..... )

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

**A. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH.**

1. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang.
  - a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku PPKD dengan tembusan Biro/PD yang membidangi dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
    - 1) Nama/judul kegiatan;
    - 2) Susunan pengurus/kepanitiaan;
    - 3) Realisasi Anggaran Biaya;
    - 4) Dokumentasi Kegiatan.
  - b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana hibah telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD).
  - c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
  - d. Bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dll) asli tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
  - e. Biro/PD yang membidangi tidak bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah.
2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa.
  - a. Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
    - 1) Nama/judul kegiatan;
    - 2) Susunan pengurus/kepanitiaan;

- 3) Penggunaan barang/jasa yang dihibahkan;
  - 4) Dokumentasi Kegiatan.
- b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa barang/jasa telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD).
  - c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
  - d. PD yang membidangi tidak bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah.

#### **B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN HIBAH**

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan hibah berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.
2. Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan kepada Gubernur dikenakan sanksi.
3. Sanksi berupa teguran dan tidak diberikan hibah dan bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah dan bantuan sosial.

## KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

---

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Pelaksanaan  
Hibah.

....., .....

Kepada  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
Lewat  
Yth. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Dan Aset  
Daerah Provinsi Jawa  
Tengah  
Selaku PPKD  
di  
SEMARANG

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan ..... nomor .....dan nomor .....tanggal.... tentang ....., bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan pemberian Hibah Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima hibah

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala ..... (PD/Unit Kerja Terkait);
2. Arsip.



## KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

---

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

menyatakan bahwa saya:

1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ..... sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan ..... nomor ..... dan nomor ..... tanggal ..... tentang .....
2. sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....  
Ketua/Kepala .....

Materai Rp. 6000

( ..... )

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH.

TATA CARA PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL

A. **BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG KEPADA INDIVIDU,  
KELUARGA DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT.**

1. Bantuan sosial bidang pendidikan:

a. Sasaran

Pemberian beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga kurang mampu.

b. Persyaratan

- 1) Memiliki identitas yang jelas;
- 2) Berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
- 3) Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat.

c. Mekanisme

- 1) Calon penerima bantuan yang memenuhi syarat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah up Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Usulan pemberian bantuan siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga kurang mampu diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan dan/atau pimpinan yayasan;
- 3) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan oleh pemohon;
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.

2. Bantuan sosial bidang kesehatan:

a. Sasaran.

Pemberian bantuan sosial bagi bidang kesehatan kepada individu, keluarga dan / atau kelompok masyarakat yang membutuhkan / kurang mampu

b. Persyaratan.

- 1) Memiliki identitas yang jelas;
- 2) Berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
- 3) Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat.

c. Mekanisme.

- 1) Calon penerima bantuan yang memenuhi syarat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah up Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Usulan pemberian bantuan sosial bagi bidang kesehatan kepada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang membutuhkan/kurang mampu di ketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat;
- 3) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan pemohon;
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.

3. Bantuan sosial bidang Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

a. Sasaran

- 1) Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Penerima bantuan stimulan pemugaran rumah diutamakan warga berpenghasilan rendah dan atau terkena musibah bencana alam yang mempunyai rumah dengan kriteria sebagai berikut :
  - a) Rumah tidak layak huni.
  - b) Rumah calon terpujar, bukan termasuk dalam asrama milik suatu instansi.
  - c) Rumah calon terpujar, bukan termasuk rumah masih dalam waktu kredit perbankan.
  - d) Berdomilisi tetap (penduduk) di lokasi kegiatan.
  - e) Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan, pemerintah, perusahaan dsb.).
  - f) Bersedia untuk berswadaya dan bergotong royong.
  - g) Rumah didirikan ditempat relokasi yang telah disetujui/disediakan pemerintah.
  - h) Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah, misal : bantaran/tanggul sungai, waduk dan sebagainya.

## 2) Pemugaran Rumah Model Panggung.

Penerima bantuan sosial stimulan pemugaran rumah panggung diutamakan warga berpenghasilan rendah dengan kriteria disamping kriteria sama dengan penerima bantuan pemugaran rumah, juga ada tambahan kriteria tinggal di lokasi yang setiap tahun mengalami genangan banjir atau rob air laut dalam waktu beberapa hari.

### b. Persyaratan

Proposal permohonan bantuan diajukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat kepada Gubernur up. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan persyaratan :

- 1) Mengetahui Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala Badan/Dinas/Kantor yang membidangi dengan tembusan Bupati/Walikota.
  - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dukungan swadaya gotong royong.
  - 3) Fotocopy KTP warga terpugar.
  - 4) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara \*).
  - 5) Berita Acara hasil musyawarah dilengkapi daftar hadir \*).
  - 6) SK Kades/Kelurahan tentang pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni) warga terpugar \*).
  - 7) Foto 0 % rumah yang akan dipugar.
  - 8) Gambar teknis sederhana.
- \*) khusus untuk kelompok masyarakat.

### c. Mekanisme

- 1) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi;
- 2) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui TAPD.

## **B. BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG.**

Tata cara Pengusulan, Evaluasi, Pengajuan Rekomendasi Dan Pertimbangan Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi.



### **C. BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA.**

#### 1. Sasaran.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dapat dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

#### 2. Persyaratan.

- a. Memiliki identitas yang jelas.
- b. Berdomisili dan/atau akibat resiko sosial tersebut terjadi dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

#### 3. Mekanisme.

- a. Individu, keluarga yang memenuhi persyaratan dan/atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan/atau PD yang membidangi melakukan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Kepala PD/Biro yang membidangi memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- d. Kepala PD/Biro yang membidangi mengajukan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

✓  
/ /

## KOP SURAT SETDA/PD

---

.....

.....,

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Gubernur Jawa Tengah  
Lampiran : Lewat  
Perihal : Rekomendasi Pemberian Bansos Yth. Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua TAPD  
di  
SEMARANG

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian bantuan sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala .....

Nama  
Pangkat  
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Arsip.

✓  
K J



DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
Dst..			

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN  
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

**A. BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN.**

1. Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang.

a. Pelaksanaan

- 1) PD yang membidangi menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD serta mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
- 2) PD yang membidangi memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Sosial tentang anggaran belanja Bantuan Sosial yang akan diberikan sesuai Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Penyaluran

- 1) Calon penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan perceairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang terlebih dahulu telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi/pengantar dari PD yang membidangi.
- 2) Surat permohonan penyaluran yang dilampiri :
  - a) Rencana Penggunaan Dana;
  - b) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
  - c) Fotocopy indentitas diri yang masih berlaku;
  - d) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
  - e) Pakta Integritas Bantuan Sosial lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
- 3) Untuk penyaluran yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan penyaluran tahap berikutnya dilampiri dengan:

- a) Fotocopy Rencana Penggunaan Dana;
  - b) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
  - c) Fotocopy indentitas diri yang masih berlaku;
  - d) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
  - e) Fotocopy Pakta Integritas Bantuan Sosial lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
  - f) Laporan penggunaan dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.
- 4) Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 6 (enam).
  - 5) Berdasarkan pengantar/rekomendasi dari PD yang membidangi, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan.

2. Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang.

a. Pelaksanaan

- 1) PD yang membidangi menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- 2) PD yang membidangi merencanakan penyerahan barang sesuai dengan Rencana Kerja Operasional PD.
- 3) Pengadaan barang yang akan diserahkan dilaksanakan oleh PD yang membidangi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Penyerahan

PD yang membidangi menyiapkan konsep Berita Acara Serah Terima Barang dan memproses penandatanganan Berita Acara dimaksud sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang.



c. Penatausahaan

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan.

**B. BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN.**

1. Pelaksanaan

- a. Biro/PD yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari pemohon;
- b. Biro/PD yang ditunjuk memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Sosial tentang Bantuan Sosial yang akan diberikan sesuai Persetujuan Gubernur.

2. Penyaluran

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya serta pengantar/rekomendasi dari Biro/PD yang ditunjuk melakukan evaluasi usulan, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah menyalurkan bantuan.
- b. Biro/PD yang ditunjuk melakukan evaluasi, menyampaikan pengantar/rekomendasi pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan:
  - 1) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
  - 2) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
  - 3) Pakta Integritas.
- c. Penyaluran dilaksanakan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila dalam kondisi tertentu dengan alasan lokasi, kondisi sosial ekonomi dan besaran bantuan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme LS, dapat dilaksanakan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang.

3. Penatausahaan

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan.

C. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL ..... .. TAHUN ANGGARAN .....

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka .....
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal ..... Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial ... Tahun Anggaran...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .... Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .... Nomor ....);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .... Nomor ....);

11

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun .....tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ..... Nomor ...);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor .....);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ..... Nomor .....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial ....., yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial ..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada ....(.....) individu/keluarga/kelompok masyarakat sebesar ....., - (.....).
- KETIGA : Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah/PD/Unit Kerja\*) untuk melaksanakan pencairan/penyaluran\*) belanja ..... kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Penggunaan belanja bantuan sosial ..... Sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KEENAM : Penerima bantuan sosial ..... wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala PD/Unit Kerja ...\*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran.....

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah\*);
8. Kepala ..... Provinsi Jawa Tengah\*\*);
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Walikota pada daerah penerima Bantuan Sosial.  
\*) Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah untuk Bansos dalam bentuk uang.  
\*\*) Kepala PD/Unit Kerja untuk Bansos dalam bentuk barang.

## KOP SURAT PENERIMA BANSOS

---

### PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Nama Lembaga :  
Alamat :

dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ..... menyatakan bahwa saya:

- a. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan bantuan sosial;
- c. melaporkan penggunaan bantuan sosial sesuai ketentuan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan

(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

✓



E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/PD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ..... Tahun .....tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .....
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-PD ..... Nomor ..... tanggal .....

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;  
(3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap ..... untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima Barang

( ..... )

PIHAK PERTAMA  
Yang Menyerahkan Barang

( ..... )

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

**A. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL.**

1. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang
  - a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku PPKD dengan tembusan Biro/PD yang membidangi dengan uraian laporan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
    - 1) Manfaat dan realisasi penggunaan dana;
    - 2) Nama/judul kegiatan\*);
    - 3) Realisasi Anggaran Biaya\*);
    - 4) Dokumentasi Kegiatan\*).

\*) untuk organisasi non pemerintah
  - b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana Bantuan Sosial telah dipergunakan sesuai dengan usulan.
  - c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
  - d. Bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dll) asli tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
2. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang
  - a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan barang kepada Gubernur melalui PD yang membidangi dengan uraian laporan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- 1) Manfaat dan realisasi penggunaan dana;
- 2) Nama/judul kegiatan\*);
- 3) Realisasi Anggaran Biaya\*);
- 4) Dokumentasi Kegiatan\*).

\*) untuk organisasi non pemerintah

- b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa barang yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan usulan.
- c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

## **B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL.**

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.
2. Penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan kepada Gubernur dikenakan sanksi.
3. Sanksi berupa teguran dan dan tidak diberikan hibah dan bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah dan bantuan sosial.

## KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

---

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Pelaksanaan  
Bantuan Sosial.

....., .....

Kepada  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
Lewat  
Yth. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Dan Aset  
Daerah Provinsi Jawa  
Tengah  
selaku PPKD  
di  
SEMARANG

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,  
bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan  
penggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima hibah

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:  
1. Kepala ..... (PD/Unit Kerja Terkait);  
2. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

## KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI\*)

---

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

menyatakan bahwa saya:

1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .... sesuai dengan usulan;
2. sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

\*) Bagi Lembaga Non Pemerintah.

....., .....  
Penerima Bantuan Sosial

( ..... )

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH.

TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI

1. Biro/PD yang membidangi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara sampling pada penerima hibah/bansos sewaktu waktu atau secara berkala;
2. Biro/PD yang membidangi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan atau tanpa melibatkan Biro/PD terkait;
3. Hasil monitoring dan evaluasi secara sampling dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO